

Sentra Terpadu Kartini Bantu Warga

TEMANGGUNG (KR) - Sentra Terpadu Kartini Temanggung menyalurkan bantuan sebanyak Rp 7 miliar kepada 5.500 penerima manfaat selama tahun 2022. Kepala Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Rachmat Koesnadi mengatakan bantuan dari lembaga di bawah Kementerian Sosial kepada ribuan penerima manfaat itu tersebar di Jateng, Jatim, dan Kaltim.

"Kami telah salurkan bantuan Rp 7 miliar di 25 kabupaten/kota di Jateng, Jatim dan Kaltim," jelas Rochmad, Kamis (29/9) dalam Gebyar Bantuan Atensi 118 untuk memperingati ulang tahun ke-118 Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Dalam Gebyar Bantuan Atensi 118 diberikan bantuan kepada 33 penerima manfaat dari berbagai kabupaten. Antara lain Temanggung, Purworejo, Nganjuk, Semarang, dan Wonosobo.

Bantuan yang disalurkan antara lain untuk keluarga atau warga disabilitas. Wujudnya terapi disabilitas, kewirausahaan, pemenuhan kesehatan seperti untuk pembayaran BPJS dan KIS, korban bencana alam, dan kelompok rentan lainnya.

Dikatakan pemenuhan kebutuhan untuk penyandang disabilitas dilakukan dengan lebih cepat, tidak melalui banyak birokrasi, sehingga bantuan bisa langsung sampai kepada penerima dengan lebih cepat. Gebyar Bantuan Atensi 118, selain untuk menyalurkan bantuan kepada penerima manfaat juga membantu penyandang disabilitas dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Dalam membantu pemasaran produk karya penyandang disabilitas, tidak hanya dilakukan berupa kegiatan tersebut tetapi juga dilakukan di sentra kreasi atensi (SKA) yang buka setiap hari. Bantuan itu antara lain permodalan warungan, dan ternak kambing.

"Kami sudah ada SKA, dalam SKA itu tidak hanya produk hasil dari penyandang disabilitas saja, namun semua yang terlibat dalam SKA itu adalah penyandang disabilitas, mulai dari barista, waiter, juru masak dan yang lainnya," jelas Rochmad. (Osy)



KR-Zaini Arrosyid

Penerimaan bantuan kambing oleh Sentra Terpadu Kartini.

Situs Watu Serut Mulai Digali

BOYOLALI (KR) - Situs Watu Serut di areal persawahan Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Boyolali mulai dilakukan penelitian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali dan sejumlah tim dari Balai Arkeolog Yogyakarta. Sekretaris Disdikbud Boyolali, Waskito Raharjo mengatakan, penelitian ini dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian benda benda purbakala yang berada di wilayah Boyolali.

"Kegiatan ini bertujuan untuk penyelamatan dan pelestarian benda purbakala. Penyelamatan ini kita lakukan arkeolog asal Yogyakarta bersama Disdikbud Boyolali dan sejumlah tokoh masyarakat di Desa Tlawong, Sawit," katanya, Kamis (29/9). Dikatakan, tim ahli pada saat ini melakukan pengukuran lokasi situs, kemudian nanti pada sudut yang dikasih tanda titik oleh tim ahli selanjutnya akan dilakukan penggalian.

Sementara itu, Konsultan Arkeologi Yogyakarta Dwi Kurnia Sandy mengatakan, mulai hari ini (Kamis) melakukan pengukuran serta penggalian guna mengetahui luasan lokasi situs. Selain itu, kegiatan ini juga ingin mengetahui sejumlah struktur yang belum ditemukan. Kita sudah memasang garis benang dan sejumlah titik untuk mengetahui jumlah strukturnya. Sampai saat ini belum mengetahui luasan dan kedalamannya berapa tersebut diketahui di hari akhir nanti," katanya. Hingga sampai saat ini, kata dia, juga belum bisa memastikan situs ini peninggalan dari agama apa. Lanjut dia, apabila dilihat dari jenis situs pada permukaannya mengarah pada agama Hindu. (R-3)

Bandara Ngloram Cepu Segera Dibuka Kembali

BLORA (KR) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong agar penerbangan komersial di Bandara Ngloram dibuka kembali. Paling tidak tiga kali dalam seminggu. Hal itu disampaikan Menhub saat memimpin rapat koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara bersama Bupati Blora, Grobogan, Rembang, Bojonegoro, dan Tubanamis, Kamis (29/9).

Rakor yang berlangsung di Kantor kemenhub tersebut juga mengundang Kepala Bandara Ngloram Ariadi Widawati, perwakilan Citilink dan Wings Air. Dua maskapai tersebut sebelumnya pernah membuka penerbangan dari dan menuju Bandara Ngloram. "Pak Menhub minta keberadaan Bandara Ngloram bisa memberikan manfaat. Kepada maskapai penerbangan diminta agar membuka kembali rute Jakarta-Blora dan sebaliknya, paling tidak seminggu tiga kali," ujar Bupati Blora H Arief Rohman SIP MSI sepulang dari Jakarta, Kamis (29/9).

Dikatakan, penerbangan dari dan ke Blora sempat terhenti karena Bandara Halim Perdanakusuma sedang direnovasi. Dengan selesainya renovasi, Menhub minta penerbangan dari dan menuju Ngloram via Halim Perdanakusuma bisa dibuka kembali. "Untuk merealisasikan ini, Bapak Menhub minta kepada pemerintah daerah sekitar Bandara Ngloram agar bisa saling mendukung," tambahnya. Menurut Menhub, Blora merupakan salah satu daerah yang cukup menarik. Tidak hanya karena ada perusahaan minyak, tetapi juga keindahan alam dan kulinernya seperti sate dan lontong opor.

Bupati Blora menyatakan kesiapannya untuk mendukung pembukaan kembali penerbangan dari dan ke Bandara Ngloram. "Dalam rakor, saya hadir bersama Bupati Rembang, Staf Ahli Bupati Bojonegoro, Sekda Grobogan, perwakilan PPSDM Migas, dan PEM Akamigas. Pada prinsipnya kita siap mendukung pembukaan kembali penerbangan di Bandara Ngloram. Saya mengusulkan penerbangan dilakukan setiap Senin pagi, Rabu pagi, dan Jumat sore dalam seminggu," ucapnya. (Tas)

Rapat Paripurna Jawaban Bupati Grobogan Tentang Rancangan APBD 2023



GEMA DPRD KAB. GROBOGAN



GROBOGAN (KR) - DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna jawaban Bupati Grobogan atas pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD Grobogan 2023, Senin pekan lalu. Rapat dipimpin Ketua DPRD Agus Siswanto SSo, dihadiri langsung Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM. Dalam rapat paripurna ke-42 itu, juga dihadiri anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, Sekda beserta para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD beserta jajarannya, Kepala Bagian Setda, para Camat dan para Direktur BUMD.

Dalam penjelasannya, Bupati Sri Sumarni menjelaskan, belum ditetapkannya Permendagri Pedoman Penyusunan APBD 2023, maka dirinya berpedoman pasal 104 PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Bab IV Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir, untuk memperoleh persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD. Kepala Daerah yang tidak mengajukan Perda tentang APBD dimaksud dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jika di kemudian hari Permendagri Pedoman Penyusunan APBD 2023 ditetapkan dan ada amanat yang harus ditindaklanjuti, kami akan menyesuaikan pada saat pembahasan dengan Banggar DPRD," terang Sri Sumarni. Tentang perbedaan rencana pendapatan, yaitu pendapatan retribusi dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hasil pembahasan dengan Banggar sebesar Rp 17.037.732.000 sementara dalam RAPBD 2023 menjadi Rp 13.575.892.000, Bupati menjelaskan, setelah dilakukan telaah ulang serta koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait maka teridentifikasi bahwa pada fase KUA-PPAS mengalami permasalahan dalam SIPD sehingga penggunaan kode rekening tidak tepat pada saat data yang disajikan secara manual.

Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian kode rekening tersebut, yaitu, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU Ki Ageng Getas Pendowo Gubug sebesar Rp 3.500.000.000 masuk rekap pendapatan retribusi daerah, yang seharusnya masuk rekap Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian retribusi pengolahan limbah cair sebesar Rp 30.000.000 dan retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp 8.160.000 pada Dinas Lingkungan Hidup masuk rekap Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang seharusnya masuk rekap Pendapatan Retribusi Daerah. Sehingga pendapatan retribusi yang

tepat adalah nilai dalam RAPBD. Tentang pembiayaan, Sri Sumarni menjelaskan, jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp 99.926.000.000 digunakan untuk menutup defisit pendapatan atas belanja dalam RAPBD 2023 sebesar Rp 32.676.000.000. Sedangkan sisanya digunakan untuk pembentukan dana cadangan Rp 9.000.000.000, penyertaan modal daerah Rp 8.250.000.000, dan pembayaran cicilan pokok utang Rp 50.000.000.000. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran RAPBD menjadi Rp 0. (Tas)



KR-M Taslim

Sidang paripurna DPRD Grobogan tentang jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2023.

Ganjar Instruksikan Penggunaan Aspal Buton

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerbitkan Surat Edaran kepada bupati dan walikota untuk menggunakan aspal nasional berbasis aspal Buton. Ganjar mengatakan, SE ini bagian dari implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Ganjar Pranowo mengemukakan hal itu kepada wartawan di Semarang, Jumat (30/9). Kebijakan tersebut menurut Ganjar merupakan bagian dari pelaksanaan atau implementasi menggunakan produk dalam negeri. Kalau aspal kita dari dalam negeri saja ada kenapa kita tidak mau menggunakan, kata Ganjar.

SE tersebut dikeluarkan Ganjar, sehari setelah Presiden Joko

Widodo melakukan kunjungan kerja di Buton, Sulawesi Tenggara. Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak lagi impor aspal karena melihat potensi aspal sangat besar di Buton yakni mencapai 662 juta ton. Di Jateng, Ganjar telah menggunakan aspal Buton untuk jalan di halaman kantornya. Selain itu, beberapa ruas jalan di Jateng juga telah memakai aspal Buton dan hasilnya bagus.

Bahkan suhunya tidak perlu panas. Untuk itu Ganjar minta kepada kepala daerah di Jawa Tengah agar menggunakan aspal buton untuk pembangunan infrastruktur.

Ganjar mengatakan, bangsa ini harus punya kepercayaan diri dan mulai menggunakan produk-produk dalam negeri. Hal itu juga berlaku untuk produk-produk lain yang memang potensial untuk pakai sendiri. Ganjar mengatakan, instruksi P3DN ini juga kembali disinggung Presiden Jokowi pada acara Pengarahan Presiden kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9).

"Pak presiden menyampaikan kurang kemiskinan, tekan inflasi, koordinasikan antar daerah. bupati gubernur wali kota semua harus turun dan jangan lupa, gunakan produk dalam negeri. Nah produk dalam negeri itulah yang beberapa item itu kita dorong termasuk untuk urusan-urusan civil work," tutur Ganjar.

Ganjar berharap implementasi P3DN bisa segera dilakukan oleh kabupaten kota di Jawa Tengah. Apalagi untuk pengadaannya mudah dan transparan melalui e-katalog LKPP Provinsi Jateng. Setidaknya kalau ada kesempatan dipakai. Yang penting menurut Gubernur, tidak boleh ada kolusi dan nggak boleh ada korupsinya. (Bdi)

Ponpes Muhammadiyah Diharap Jadi Pusat Pengkaderan

BANJARNEGARA

(KR) - Pondok Pesantren (Ponpes) Muhammadiyah diharapkan menjadi pusat pengkaderan dan wisata edukasi Islami. Karenanya, pengkaderan hendaknya dilakukan secara maksimal. Kehadiran pusat pengkaderan itu merupakan hal penting bagi organisasi seperti persyarikatan Muhammadiyah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir mengemukakan hal tersebut ketika meresmikan masjid dan kompleks Pondok Pesantren (Ponpes) Muhammadiyah Istana Quran sebagai pusat pengkaderan dan wisata edukasi, di Desa Surodadi Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara.

Desa Surodadi sendiri merupakan salah satu desa binaan yang dikembangkan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UMY melalui skema pengabdian masyarakat Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga pengabdian masyarakat yang dilakukan LPM UMY. "Saya sangat bersyukur, pesantren ini akan jadi pusat pengkaderan Muhammadiyah juga sebagai wisata edukasi Islami di sini," tandasnya.

Haedar juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak melupakan marwah gerakan Muhammadiyah dan juga memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. "Alhamdulillah yang datang pada peresmian masjid ini ramai, saya berharap masyarakat khususnya jamaah Muhammadiyah selalu memakmurkan dan

meramaikan masjid sama ramainya seperti siang ini," tutur Haedar.

Kepala LPM UMY Dr Ir Gatot Supangkat Samidjo mengemukakan, UMY akan terus mengembangkan potensi yang ada di Desa Surodadi. Pembinaan yang sudah 4 tahun dilakukan diharap ke depannya desa ini tidak hanya menjadi pusat pengkaderan dan wisata edukasi Islami saja, tetapi juga akan dikembangkan menjadi desa Argowisata.

UMY disebut Gatot turut membantu pembangunan asrama putra dan puteri pondok pesantren. Selain itu UMY juga memberikan bantuan berupa instalasi air bersih dan air minum bagi santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Istana Quran. Diakui, UMY selalu berkomitmen untuk bergandengan de-

ngan Muhammadiyah dalam mengembangkan umat. "UMY berperan aktif sebagai pusat pengembangan Muhammadiyah. UMY akan selalu berkontribusi dalam penguatan Persyarikatan Muhammadiyah terutama dalam pengembangan umat," kata Gatot.

Sementara itu, Rektor UMY Prof Dr Ir Gunawan Budiyo dalam sambutannya berharap pondok pesantren Muhammadiyah Istana Quran mampu mencetak generasi muslim yang unggul dan Islami.

"Sistem pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah cukup bagus. Saya berharap banyak jebolan-jebolan pondok pesantren ini berkualitas unggul dan menjadi generasi muslim yang Islami," tandas Gunawan. (Fsy)



KR-Istimewa

Haedar Mashir menandatangani prasasti peresmian Ponpes Muhammadiyah Istana Qiran.

KPU Ajak Masyarakat Aktif Cek Nama Sipol

PURWOREJO (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo mengajak masyarakat untuk aktif mengecek namanya dalam Sistem Informasi Pemilu (Sipol) di dalam website KPU. Ajakan itu untuk mengantisipasi adanya pencatutan nama oleh partai politik (parpol) yang sedang melakukan pendaftaran di KPU.

Anggota KPU Purworejo Widya Astuti SS MPAR mengatakan, nama seseorang bisa saja dimasukkan menjadi anggota partai politik tanpa sepengetahuan orang tersebut. "Maka untuk mengetahui apakah seseorang termasuk sebagai anggota parpol atau tidak, KPU menyediakan kanal aplikasi Cek Anggota Parpol dalam website infopemilu.kpu.go.id," ungkapnya ketika bertemu dengan awak media, Rabu (27/9) sore. Cara mengeceknya, kata Widya, juga mudah. Warga tinggal mengetikkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera dalam KTP elektronik, pada kolom kanal Cek Anggota Parpol.

Aplikasi Sipol akan memunculkan keterangan NIK tersebut sudah terdaftar

dalam Sipol sebagai anggota parpol atau belum. "Apabila ternyata ada dan warga merasa keberatan karena faktanya bukan anggota parpol, mereka bisa mengajukan keberatan kepada KPU setempat," tuturnya. KPU akan meminta tangkapan layar Sipol dan foto atau scan KTP. KPU Purworejo, lanjutnya, melalui akun helpdesk akan melihat dan menindaklanjuti dengan klarifikasi terhadap parpol terkait.

"Hasilnya kami unggah di helpdesk sehingga akan terlihat oleh KPU RI sehingga data bisa diperbarui dengan cara KPU pusat berkoordinasi dengan DPP parpol bersangkutan untuk menghapus nama tersebut dari Sipol," terangnya. Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo Rinto Hariyadi menuturkan, data Sipol merupakan kebenaran formal di mana nama yang tercantum di dalamnya adalah pengurus atau anggota parpol. "Meskipun, masuknya seseorang ke dalam Sipol diketahui oleh yang bersangkutan atau tidak diketahui, misalnya karena dicatut," ucapnya. (Jas)

SEGENAP
PIMPINAN, ANGGOTA DAN
SEKRETARIAT DPRD
KAB. GROBOGAN

MENGUCAPKAN SELAMAT
HARI KESAKTIAN PANCASILA
1 Oktober 2022

AGUS SISWANTO S.So, D. HM. NURWIDODO M.Si, H. SUGENG PRALISTYA S.H.M, H.M. FATMA S.Pd.I, Diti. Pd.Mo.Mu

f DPRD GROBOGAN @dprd_grobogan @dprd_grobogan Sctwan Grobogan